

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR DI SMA BHAKTI SUCI JAYA TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

Qurniati¹, Mud Dharminto², Evi Sepriati³, Eka Hoiriyah⁴, Ellin Zahara⁵

¹ SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir

² Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (SMA Negeri 2 Babat Supat Muba)

³ SMP Negeri 1 Teluk Gelam

⁴ Depag Kota Palembang

⁵Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel

Email: qurniatirukiyono127@gmail.com¹, mudharminto@gmail.com², eviseprianti80@gmail.com³, ehairiyah68@gmail.com⁴, ellinzahara@gmail.com⁵

ABSTRACT

The title of this research is "Implementation of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 27 of 2008 concerning Academic Qualification Standards and Counselor Competencies at Bhakti Suci Jaya High School Tanjung Batu, Ogan Ilir Regency". The formulation of the research problem is how to implement the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 27 of 2008 concerning Academic Qualification Standards and Counselor Competencies at Bhakti Suci Jaya High School Tanjung Batu, Ogan Ilir Regency. With a qualitative research methodology, this study wanted to describe the implementation of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 27 of 2008 at SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu, based on data obtained from documentation, interviews, and observations. The results of the research are descriptive data on four factors of the public policy implementation model according to Edward, namely communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure, which affect the implementation of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 27 of 2008 concerning Academic Qualification Standards and Counselor Competencies. Based on the results of this study, several things can be recommended, namely the need for sustainable structured communication and an attitude from the government that supports the achievement of qualification standards and counselor competencies so that the guidance and counseling program in schools is implemented.

Keywords: Implementation, Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 27 of 2008, a model for implementing public policies

ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir". Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Dengan metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini ingin mendeskripsikan pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu, berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian berupa data deskriptif mengenai empat faktor dari model implementasi kebijakan publik menurut Edward yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi, yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa hal, yaitu diperlukan komunikasi yang terstruktur secara berkelanjutan dan sikap dari pemerintah yang mendukung tercapainya standar kualifikasi dan kompetensi konselor agar program bimbingan dan konseling di sekolah terlaksana.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008, model implementasi kebijakan publik.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mendidik peserta didik dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan intelektual, agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis maupun sosial (Rosyada, 2004:3). Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusannya masuk ke perguruan tinggi. Dilihat dari sikap dan perilaku siswa SMA juga makin banyak yang menyimpang, terbukti jumlah tawuran antar pelajar makin meningkat. Pendidikan yang bermutu akan mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler dan bidang pembinaan siswa atau bimbingan konseling (Yusuf dan Nurihsan, 2006:4).

Bidang pembinaan siswa adalah program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik (siswa) dalam upaya

mencapai perkembangannya yang optimal, melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Personel yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang ini adalah guru pembimbing atau konselor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah serta No. 56 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 29 Tahun 1990 pada pasal 27 berisikan bimbingan yang menyebutkan:

1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.
2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

Dasar hukum lainnya mengenai program bimbingan dan konseling tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Konselor, diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan bimbingan

konseling sesuai dengan kompetensinya sebagai konselor diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial, serta profesional.

Program layanan bimbingan konseling tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalismenya guru BK tersebut

dalam melayani kliennya dengan terprogram secara baik apabila kurang atau tidak didukung faktor lain, misalnya faktor pengalaman bekerja. Program bimbingan konseling dapat tercapai bila seorang konselor atau guru pembimbing melaksanakan pola Bimbingan Konseling adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Murid yang memanfaatkan Pola Bimbingan Konseling SMA Bhakti Suci
Jaya Tanjung Batu Tahun Ajaran 2018/2019

| Sistem Pola Bimbingan Konseling SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Pada Tahun ajaran 2018/2019 | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| No | Bentuk Bimbingan Konseling | Peserta Bimbingan |
| 1 | Bimbingan Pribadi | 20 murid |
| 2 | Bimbingan Sosial | 42 murid |
| 3 | Bimbingan Belajar | 39 murid |

Sumber data Guru BK SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Tahun 2019

Tujuan dari bimbingan dan konseling menurut Myers, 1992: “bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya”. Crow dan Crow (1990) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling mempunyai dua tujuan.

Untuk membentuk karakter belajar siswa agar tetap memiliki motivasi yang tinggi diperlukan layanan dari guru pembimbing. Ada beberapa tujuan yang akan dicapai oleh guru pembimbing yaitu (Bahan pelatihan guru BK : 1996) agar siswa memiliki kebiasaan belajar yang

efektif, dapat mengatasi kesulitan belajar, mampu membaca buku yang efektif, dapat membagi waktu belajar dan menyenangkan pelajaran-pelajaran tertentu.

Dengan dasar diperlukannya bimbingan dan konseling terlaksana dengan baik dan lancar di sekolah ini, maka sangat perlu peraturan yang baku mengenai standar kualifikasi dan kompetensi seorang guru bimbingan konseling (konselor). Dalam hal ini peraturannya tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

Implementasi Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat bervariasi bentuknya. Secara sederhana Dye (1981:3) menyatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Laswell dan Kaplan (1970:71) mendefinisikan sebagai *a projected program of goals, values, and practices*. Easton (1965:212) mendefinisikan sebagai *the impact of government activity*. Steward (2000:18) mendefinisikan sebagai *a process or a series pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*. Ranney seperti yang dikutip oleh Laster dan Steward (2000:18) mendefinisikan sebagai *a selected line of action or deceleration of intern*. Sementara Peterson (2003:130) mendefinisikan sebagai *government action to address some problem*. B.G. Peters (1993:4) mendefinisikan sebagai *the sun of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*. Selanjutnya Anderson (lihat Winarno,1989:3) mendefinisikan kebijakan merupakan arah tindakan

sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, *Udoji* dalam Wahab, menyatakan bahwa “Implementasi adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan” (Wahab, 2001: 59). Implementasi kebijakan sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan karena dari implementasi adalah mengembangkan suatu hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan.

Implementasi kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal. *Hogwood* dan *Gunn* dalam Wahab telah membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 kategori yaitu 1) *Non Implementation* atau tidak terimplementasikan dan 2) *Unsuccessful Implementation* atau implementasi yang tidak berhasil (Wahab, 2001: 61).

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh 3 hal yaitu:

1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*).
2. Kebijakannya sendiri memang jelek

(*bad policy*), dan
 3. Kebijakan itu memang bernasib jelek
 (*bad luck*). (Wahab, 2001: 62).

Nugroho (2004 : 179) menyebutkan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan suatu implementasi kebijakan, yaitu (a)Tepat kebijakan; (b)Tepat pelaksanaan; (c)Tepat target; (d)Tepat lingkungan.

3. Model- Model Implementasi Kebijakan Publik

Model adalah penyederhanaan dari realitas yang diwakili. Model dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda. Model abstrak adalah penyederhanaan fenomena sosial atau konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, dan gambar-gambar atau rumus-rumus matematis mengenai fenomena yang dideskripsikan. Model abstrak inilah yang digunakan dalam kebijakan publik (Suharto, 2005:21).

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, model terutama dibuat untuk menjelaskan proses, karakteristik, mekanisme, serta menentukan strategi-strategi kebijakn sosial. Model implementasi memberi fokus perhatian yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang dari para pembuatnya dan ini menggambarkan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau implementasi program (Wahab, 2005). Keberhasilan

implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor dan tiap faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

4. Model George Edward III

Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat empat faktor atau variabel kritis yaitu: komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi. Keempat faktor ini berinteraksi secara simultan untuk membantu atau menghalangi implementasi kebijakan

Dalam kebijakan publik diketahui ada dua model yaitu 1)Model Perumusan Kebijakan dan 2)Model Implementasi Kebijakan. Di antara kedua model tersebut terdapat perbedaan yaitu: model perumusan kebijakan digunakan dalam proses perumusan suatu kebijakan sedangkan model implementasi kebijakan digunakan dalam implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan. Jadi, perbedaannya terletak pada proses kegiatan kebijakan tersebut, apakah pada proses perumusannya atau pada proses implementasinya.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6).

Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan

keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1)memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2)menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3)menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4)mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.

Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta

diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor, disingkat Kons.

6. Kualifikasi Akademik Konselor

Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.

Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah:

1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
2. Berpendidikan profesi konselor.

7. Kompetensi Konselor

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005,

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

8. Prinsip-Prinsip dalam Bimbingan dan Konseling

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling ada beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi dalam memberikan layanan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu (*guidance is for all individuals*).
- b. Bimbingan bersifat individualisasi.
- c. Bimbingan menekankan hal yang positif.
- d. Bimbingan merupakan usaha bersama.
- e. Pengambilan keputusan.
- f. Bimbingan berlangsung dalam berbagai setting (adegan) kehidupan pemberian layanan bimbingan tidak harus di sekolah, tetapi juga dilingkungan keluarga, perusahaan/ industri, lembaga pemerintah/ swasta, dan masyarakat pada umumnya.

9. Asas Asas Bimbingan dan Konseling

Untuk mencapai hasil bimbingan yang maksimal tentunya diperlukan banyak informasi dari konseli, untuk menjamin itu semua diperlukan cara asas yang dapat meyakinkan konseli agar tidak memiliki keraguan lagi dalam memberikan informasi kepada konselor, hal itu diwujudkan dalam bentuk asas bimbingan dan konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, alih

tangan kasus, tut wuri handayani.

10. Bidang Bimbingan

Bidang-bidang bimbingan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan akademik.
- b. Bimbingan sosial pribadi.
- c. Bimbingan karir.

11. Bimbingan dan Konseling

Kata bimbingan memiliki arti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu (KUBI, 1990: 117). Konseling berasal dari bahasa Inggris *counselling* yang berarti penyuluhan /penerangan (KUBI, 1990: 866). Menurut Prayitno dan Amti, (2004:99) yang mendefinisikan bimbingan dan merupakan "Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku".

12. Kegiatan Program Bimbingan Konseling

Program Bimbingan Konseling yang dilakukan tahun pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut.

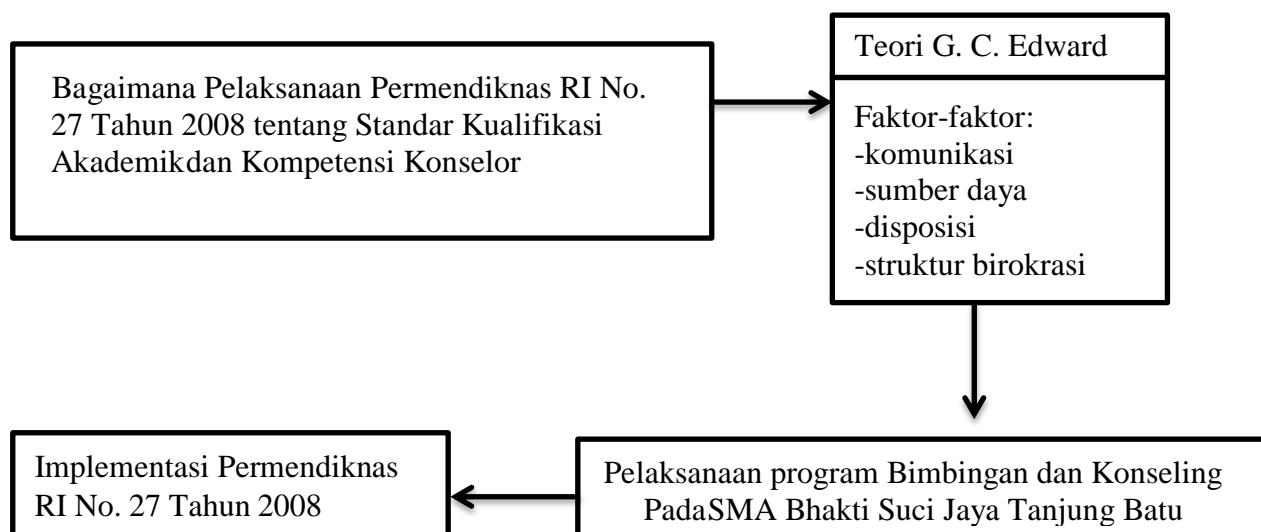
1. Persiapan
 - a. Penyusunan program
 - b. Pembagian tugas guru BK
 - c. Konsultasi program kegiatan BK
 - d. Penyediaan fasilitas BK

2. Pengumpulan Data Dan Analisa Data

13. Teori Edward III

Pada penelitian ini, model penelitian yang dapat digunakan sebagai landasan teori yang mendukung penelitian terhadap pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling adalah model implementasi

kebijakan menurut Edward, yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Adapun pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1

Model Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (Diadopsi dari model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III)

C.METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang

akan dijadikan sebagai sumber informasi. Adapun informan kunci dalam penelitian adalah Kepala Sekolah, dan Guru Bimbingan dan Konseling, sedangkan informan pendukung adalah siswa dan wali siswa.

Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berupa surat keputusan dan dokumen yang berkaitan

dengan kualitas seperti dokumen-dokumen resmi kerjasama, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dapat diperoleh melalui jurnal, buku, data statistik atau sumber-sumber lainnya yang relevan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut:

- a) Tahapan memasuki lapangan (*getting in*)
- b) Tahapan ketika berada di lapangan (*getting along*)
- c) Tahapan keluar dari Lapangan (*getting out*)

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu melalui: *check*, *re-check* dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari teori, metodologi dan persepsi peneliti.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 (tiga) komponen utama yaitu; Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu dengan waktu penelitian selama 6 bulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penduduk asli Kelurahan Tanjung

Batu termasuk Suku Penesak, disebut juga suku Sasak. Masyarakat di kecamatan Tanjung Batu memiliki kemampuan estetika dan kemampuan astetik yang tinggi, hal ini terlihat dalam berbagai karya kesenirupaan terutama yang bersifat terapan (*applied art*) yang berwujud seni ukir, kerajinan emas, perak, keramik, tenun dan ikat, pertukangan kayu, pandai besi, dan lain-lain.

Secara geografis kelurahan Tanjung Batu terletak diantara 30 02' sampai 30 48' Lintang Selatan dan diantara 1040 20' sampai 1040 48' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3375 Ha. Pada tahun 2006 Kelurahan Tanjung Batu dimekarkan menjadi 2 Kelurahan yakni menjadi Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Tanjung Batu Timur sesuai dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2006.

Berdasarkan data dari profil kelurahan tahun 2017, tingkat kelurahan Tanjung Batu Timur berjumlah 3429 jiwa, terdiri atas 1837 laki-laki dan 1770 jiwa perempuan. Jumlah tersebut diatas 871 kepala keluarga (KK).

Mengenai struktur pemerintah yang ada di kelurahan Tanjung Batu pada dasarnya tidak berbeda dengan kelurahan-kelurahan lain. Kelurahan Tanjung Batu Timur dikepalai oleh seorang kepala lurah yaitu Hasan Basri, S.IP dan terdiri

atas sekretaris lurah yaitu ST. Nursiah, Kasi, LK, RT, LPM, Lembaga Adat, dan P3N.

SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir beralamat Jalan Merdeka KM. 53 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang didirikan pada tahun pelajaran 1998 dengan luas tanah sekolah ini adalah 5.566 m² yang didapat melalui hibah sedangkan luas bangunan seluruhnya adalah 3.636 m².

Kondisi lingkungan sekolah ini terletak di daerah yang cukup kondusif dan strategis, sehingga sangat baik untuk kegiatan proses belajar mengajar karena berada di lingkungan pendidikan. Sekolah ini memiliki mushola yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar.

Tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terbilang cukup banyak hal ini disebabkan banyaknya yang mutasi dari wilayah lain baik dari dalam kabupaten maupun dari luar serta adanya tambahan guru Bantu yang diangkat menjadi PNS. Jumlah guru-guru sebanyak 10 orang dan jumlah guru di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir berjumlah 27 orang yang didominasi guru perempuan, hal ini dikarenakan banyaknya guru pindah

dengan alasan ikut suami. Tingkat pendidikan bervariasi, mulai dari, D3, S1 juga ada S2. Sementara untuk pangkat dan golongan termasuk cukup bagus, hal ini dapat dilihat dari ini banyaknya guru yang telah menempati golongan IV-a serta 98,5% sudah bersertifikat sebagai guru profesional. Sedangkan tenaga kependidikan (guru-guru dan tata usaha) terdiri dari 6 orang, yaitu 5 orang Laki-laki dengan golongan III dan 1 orang guru-guru perempuan.

Peserta didik SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda. Bakat, minat, dan kemampuan mereka tentu berbeda. Hal ini berpengaruh terhadap upaya melakukan pendekatan khusus dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.

Jumlah siswa terbanyak pada tahun ajaran 2016/2017 yaitu sebanyak 431 siswa, sedangkan terendah jumlah siswa pada tahun ajaran 2018/2019 yaitu sebanyak 209 siswa. Dari total jumlah siswa tersebut tingkat ekonomi dan pendidikan orang tua sangat beragam. Mulai dari penghasilan di bawah Rp 1.500.000,00 sampai dengan penghasilan di atas Rp 5.000.000,00. Sedangkan tingkat pendidikan orang tua bervariasi dari yang berpendidikan rendah SD sampai yang berpendidikan tinggi S1.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat meskipun belum cukup sesuai standar nasional. Hal tersebut meliputi sarana fisik gedung/kelas, kantor, tempat ibadah, lapangan olahraga, laboratorium, perpustakaan, sarana air bersih, alat komunikasi, WC, kantin, UKS, BK, koperasi siswa.

Sarana dan prasarana vital yang belum terealisasi adalah laboratorium bahasa, ruang multimedia, ruang praktik keterampilan, dan ruang praktik kesenian.

2. Implementasi kebijakan Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu.

2.1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan program merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling melibatkan pemerintah dan para guru, dimana pemerintah sebagai fasilitator program dan guru-guru sebagai sasaran program dan siswa sebagai outcome.

Analisis implementasi dalam penelitian mengenai pelaksanaan

bimbingan dan konseling di Kabupaten Ogan Ilir dijelaskan dengan empat indikator yaitu : analisis pada sub indikator komunikasi, sub indikator kedua sumber daya, sub indikator ketiga disposisi, dan sub indikator ke empat struktur birokrasi. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu data primer berdasarkan hasil wawancara kepada informan. Selain itu juga dipergunakan data sekunder.

1. Faktor Komunikasi

Berikut data yang didapat dari hasil wawancara dengan guru SMA Bhakti Suci Jaya pada, Ibu Merni, S.Pd.

“Kami tidak pernah dipaksa, karena dalam mengikuti program merupakan salah satu pekerjaan kami, namun kami diberi pengertian dengan cara yang baik melalui penyuluhan, bimtek dan workshop, begitu juga dengan petugas lapangan disini selalu siap sedia untuk membantu kami jika diperlukan” (Kamis, 28 januari 2021)

Kemudian dari informan hasil dari wawancara dengan guru bimbingan konseling, Ibu Aida Fitria, S.Pd.

“Adanya Sosialisasi Pedoman pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat bermanfaat bagi sekolah kami terutama buat saya dalam penyusunan program saya selaku guru bimbingan konseling dan juga bermanfaat bagi guru

lainnya mereka jadi tahu mana prosedur bimbingan dan konseling yang harus kami laksanakan.” (Rabu 27, Januari 2021)

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai komunikasi yang baik kepada guru dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian-pengertian dengan cara-cara yang baik kepada guru sehingga timbul kesadaran dari guru-guru itu sendiri untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya dari guru-guru adalah sasaran terhadap program yang dilaksanakan. Sumber daya ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan program, karena tanpa sumber daya yang baik dari guru-guru penerapan program akan mengalami kendala karena guru-guru tidak mampu melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, begitu pun sebaliknya dengan sumber daya yang baik maka dapat mendukung pelaksanaan program dengan baik.

Berikut kutipan wawancara dari hasil wawancara dengan guru Bimbingan konseling, Ibu Aida Fitria, S.Pd.

“Kami merasa beruntung dapat mengikuti program pemerintah untuk Teknis pelaksanaan bimbingan dan

konseling melalui penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.” (Rabu, 27 Januari 2021).

Berikut informasi yang disampaikan oleh informan berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, Ibu Mustahillah, S.Ag.

“Kami sangat berterimah kasih dengan adanya pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah kami, jadi tugas kami selaku walikelas bisa terbantu dalam membimbing/dalam pemecahan masalah anak-anak didik kami dan juga kami dapat mengerti bagaimana melaksanakan Teknis pelaksanaan bimbingan dan konseling pada sekolah kami” (Kamis, 28 Januari 2021).

Berikut informasi yang disampaikan oleh informan berdasarkan hasil wawancara dengan siswa AZ.

“Dengan adanya program bimbingan koseling dapat membantu kami dalam pemecahan permasalahan yang kami hadapi dan juga kami merasa ada teman yang diajak bicara terutama dalam bimbingan karir “ (Rabu, 27 Januari 2021).

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa guru-guru sebagai sumber daya yang kompeten terhadap pelaksanaan program dan mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk melaksanakan teknis pelaksanaan

bimbingan dan konseling, sehingga guru lain maupun siswa merasa terbantu dengan program bimbingan dan konseling di SMA Bhakti Suci Jaya.

3. Faktor Sikap/Kecenderungan (*Disposisi*)

Pada SMA Bhakti Suci Jaya, telah menunjukkan sikap yang baik dan positif terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia dan komitmen yang kuat untuk mensukseskan dan mendukung terselenggaranya program bimbingan dan konseling. Sikap ini tercermin dari Pimpinan Sekolah, guru dan siswa dan dari Pimpinan Kementerian Pendidikan Nasional. Kongkritnya pimpinan sekolah mendorong guru-guru dan siswanya untuk meningkatkan kompetensinya, agar program bimbingan dan konseling ini berjalan dengan baik yang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sikap pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, mendukung secara nyata sebagai pelaksana program yang

memberikan penyuluhan, bimtek dan workshop kepada guru sedangkan dari pihak guru diperoleh informasi bahwa para guru sangat antusias dalam menanggapi sosialisasi pedoman pelaksanaan bimbingan dan konseling.

Adapun peran serta pemerintah dalam menjalankan program menurut informan dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Rukiyono, S.Pd., M.Si.

“Pemerintah berperan serta dalam penyuluhan-penyuluhan melalui Dinas Pendidikan”.

“Dinas kesehatan dan pihak dinas lainnya sangat berperan dalam keberhasilan bimbingan dan konseling di sekolah kami” Selasa, 26 Januari 2021.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi baik di dinas pendidikan maupun sekolah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan dengan melibatkan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi ini sangat penting dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, karena terkait aturan dan kebijakan pemerintah

pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional.

Diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan pengawas satuan pendidikan, Bapak Drs. Handala.

“Secara terstruktur dan terprogram dengan baik, pemerintah itu berupaya memberikan pengertian kepada guru disini agar mengetahui manfaat mengikuti Teknis pelaksanaan bimbingan dan konseling, kami diajarkan bagaimana prosedur pencatatan dan cara pembuatan dokumen serta manfaat - manfaatnya sehingga kami tergerak sendiri untuk melakukan hal yang baik untuk diri kami sendiri, siswa serta Sekolah” (Selasa, 2 Februari 2021).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Komunikasi yang terjalin berjalan dengan baik antara pemerintah, pimpinan sekolah, wakil pimpinan sekolah, dan guru mata pelajaran. baiknya komunikasi ini terlihat dari

diadakannya forum musyawarah dengan tujuan dialog dari hati ke hati (*sharing*), dan upaya-upaya peningkatan mutu guru.

2. Sumber daya yang dimiliki sekolah yaitu pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai.
3. Dari segi sikap dan komitmen tidak mengalami hambatan, hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah yang mendukung, dan para pimpinan sekolah, guru siswa, memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mendukung program pelaksanaan bimbingan dan konseling.
4. Struktur birokrasi baik di dinas pendidikan maupun sekolah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya SOP berupa Panduan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. Hal ini sangat penting mengingat program bimbingan dan konseling merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik oleh peneliti, maka hal yang dapat disarankan oleh peneliti mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya komunikasi yang sudah terjalin dengan baik antara pemerintah, pimpinan sekolah, wakil pimpinan sekolah, dan guru mata pelajaran, selalu terjalin dengan baik dan berkesinambungan.
2. Diharapkan dengan sumber daya yang sudah memadai di sekolah yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, senantiasa didukung peningkatannya oleh pemerintah, dengan semakin memfasilitasi kegiatan- kegiatan positif, serta sarana prasarana dan pembiayaannya.
3. Diharapkan sikap dan komitmen baik dari pemerintah, maupun para pimpinan sekolah, guru, siswa, dan seluruh warga sekolah, senantiasa terjalin dan semakin kuat untuk mendukung program pelaksanaan bimbingan dan konseling, agar bimbingan konseling dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan untuk mendorong dan menjaga implementasi Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

4. Hendaknya struktur birokrasi baik di dinas pendidikan maupun sekolah semakin terstruktur dan terorganisir dengan rapi serta terencana dalam mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Nabuko, (1997), Metode Penelitian, cetakan pertama, Jakarta: BumiAksara
- Arikunto, Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gray, et al. (2002), Pengantar Evaluasi Proyek, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan (2000), Pengantar Studi Penelitian Kebanyakan, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Dunn, William N. (1998), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dipohusodo, Istimawan., (1996), Manajemerl Proyek dan Konstruksi Jilid I, Yogyakarta : Kanisius.

- Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy, Six Edition*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc
- Imam, Soeharto., (1999), *Manajemen Proyek: Dari Koseptual Sampai Operasional*, Jakarta: Erlangga
- Islamy, M: Irfan (2001), *Prinsip prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara
- Juliantoro, Dadang (2000), *Arus Bawah Demokrasi. Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laperu Pustaka Utama
- Juliartha, Edward. 2009. *Model implementasi kebijakan publik*. Trio RimbaPersada Jakarta
- Muhajir., (2000), *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka serasin.
- Moleong, Lexy., (1994), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Manullang., (1992), *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nazir, Moh., (2000), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik* (2008), Jakarta. Mendiknas.
- Rahmat,(1997), *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Karya. Siagian., (2000), *Administrasi pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Surahkrnad (1995), *Pengantar Penelitian Ilmiah : Metode dan Teknik*, Bandung:Transito.
- Suwatno,.et.,al (2002), *Manajemen Modern*, Bandung : Zafira.
- Sutarto, 2000, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu,2004, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Rineka Cipta ,Jakarta.
- Syarifudin, Zainal & Tangkilisan Hessel, 2004, *Kinerja Organisasi Publik*,YPAPI, Yogyakarta
- Soedjadi, (1995), *Organisasi And Metode Penunjang Proses Manajemen*, Jakarya:PT.Toko Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo (1995), *PengantarAdministrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3E5.
- Wahab, Solichin Abdul, (1997), *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Zainun,Buchari, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Indonesia*, CV.Haji Mas Agung, Jakarta.